



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2023

PLT. SEKRETARIS SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi publik Komisi Informasi Pusat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik 2023 Komisi Informasi Pusat;

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2023.

PERTAMA

Daftar Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 15 Maret 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Nurik Purwanti

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI INFORMASI PUSAT

A.	INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIMUNGKINKAN SECARA BERKALA	Ringkasan Isi Informasi	CATATAN	Pegawai yang Mengurus	Unit PIC yang Mengurus	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1.	Informasi tentang Profil Komisi Informasi Pusat	<p>I. Kedudukan atau domisil, alamat lengkap : Nama : Wisma BSSG Gedung Annex Lantai 1, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat Telp. : 021-34630741 F.bx : 021-34630741 E-mail : sekretaris@komiinformasi.go.id Website : https://komiinformasi.go.id/ Webter : @KIPusat Instagram : @komiinformasiipusat Facebook : Komisi Informasi Pusat Youtube : Komisi Informasi Pusat Tik Tok : Komisi Informasi Pusat</p> <p>II. Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat (Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)</p> <p>A. Tugas</p> <p>1) Menerima, memeriksa, dan memulus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menelaah kebijakan umum pelayanan Informasi Publik menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.</p> <p>2) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memulus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.</p> <p>B. Fungsi</p> <p>Komis Informasi Pusat berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.</p> <p>C. Wewenang</p> <p>Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Pusat memiliki wewenang menanggapi dan/atau mengpergunakan cara pikir yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait menghidupkan kapasitas dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, meminta keterangan atau informasi Publik; mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi. Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.</p> <p>III. Visi Misi</p> <p>Tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Periode 2022 - 2026</p> <p>A. VISI "Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercapainya Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"</p> <p>B. MISI</p> <p>a). Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan dan Sederhana. b). Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Dan Sumber Daya yang Optimal Dan Profesional Melalui Standartisasi Dan Sertifikasi. c). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi Dan Literasi. d). Membangun Jejaring Komisi Informasi Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Dan Mandiri Integritas Melalui Teraf Kepada Sumber Daya, Hubungan Internal, Dan Pemangku Kepentingan. e). Membantu Percepatan Sasaran Nasional Dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera, Dan Berkeadilan.</p>	<p>https://komiinformasi.go.id/</p>	Ketua Tim Umum	Tim website	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website Media Sosial Majalah BUKA

1.2	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural	1. Profil Komisiner Komisi Informasi Pusat, Periode 2022 - 2026 2. Struktur Sekretariat Komisi Informasi Pusat 3. Tugas Fungsi Struktur Sekretariat Komisi Informasi Pusat Pasal 1 Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat KI Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretarian di lingkungan Komisi Informasi Pusat. Sekretariat KI Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 2 Sekretariat KI Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pasal 3 Sekretariat KI Pusat menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengadaan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kemahasiswaan; dan d. Penyajian bahan dokumentasi dan kepublikasian.	https://komisiinformasi.go.id/v1/profile	Ketua Tim Umum	Tim website	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website
1.3	Laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah dipenkasa, diverifikasi, dan telah dikirmkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisioner dan Pimpinan Komisi Informasi Pusat dalam proses pelaporan LHKPN periode 2022 (tahun lapor 2023)	https://komisiinformasi.go.id/v3/E-LHKPN	Ketua Tim Umum	Keuangan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
2	Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat	Informasi Program dan Kegiatan Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 : I. Indeks Keterbukaan Informasi Publik II. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a. Ayudikasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Informasi Publik 1.1. Sidang Ayudikasi Nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2.1. Penguatan Kapasitas KI Propesi/kabupaten/kota dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Tahapan, Perilaku/Perilaku 3. Coaching clinic Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kalangan Mahasiswa dan/atauahabit keterbukaan Informasi Publik di Kalangan Mahasiswa b. Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat 1.1. Penyusunan Regulasi/Kebijakan mengenai Keterbukaan Informasi Publik 2.1. Review Kebijakan Publik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah 3.1. Penguatan Keterbukaan Informasi Pemilihan Umum dan Inisiasi MoU dengan Penyelenggara Pemilu 4.1. Review Undang-undang KIP, PP serta Peraturan Komisi Informasi lainnya 5.1. Ayudikasi Data dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 c. Tatakelola Dokumen Berbasis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1.1. Pengembangan Tata Kelola Pendokumentasian dan Klasifikasi Asip dan Register Komisi Informasi Pusat 2.1. Koneksi, Efisiensi dan Diseminasi Putusan Komisi Informasi 3.1. Koordinasi dan Tindak Register Sengketa Informasi Publik d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Perundang dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 1.1. Bimtek Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/kota yang baru 2.1. Penyusunan Modul Digital (Audio Visual) e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 1.1. Peningkatan Ayudikasi terkait dengan Komisi Informasi (JDH, SANSI dan SPBE) 2.1. Program Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi untuk komunitas publik (Disabilitas/militer/kumum) dan Forum							

	<p>Edukasi Bidang di Media</p> <p>3)Kajian Edukasi Clusterisasi badan publik dalam mualan mudan pendalaman pemahaman PPIID terhadap ketubukan informasi publik</p> <p>I)Pendalaman Fungsi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap Komisioner</p> <p>III. Pengawasan Pelaksanaan Ketertuan Ketubukan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah</p> <p>a)Monev Implementasi Ketubukan Informasi Badan Publik</p> <p>1)Monev Implementasi Ketubukan Informasi Badan Publik</p> <p>2)Monev Isu Sektoral (KIP Award)</p> <p>b) Harmonisasi K/L untuk Mengakselerasi Ketubukan Informasi Publik</p> <p>1)Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia</p> <p>2)Penyediaan Layanan Informasi PPIID Komisi Informasi Pusat</p> <p>3)MOCJ Audienasi dengan Komendemen/Lembaga Mitra Kerja eksternal, G20/ANCO dan Media</p> <p>4)Asesmen Ketubukan Komisi Informasi Provinsi, Kota atau Kabupaten</p> <p>c)Kajian dan Publikasi Ketubukan</p> <p>1)Kajian Kebijakan Ketubukan dan Policy Brief/ Komisi Informasi</p> <p>2)Penyusunan Jurnal dan Majalah Ketubukan Informasi</p> <p>3)Kajian Tematik Implementasi/Revisi UU KIP</p> <p>4)Penyusunan Blueprint Sistem Informasi Terintegrasi</p> <p>d)Peningkatan Pengetahuan Badan Publik untuk Mendorong Implementasi Ketubukan Informasi yang lebih baik</p> <p>1)Bentuk Sistem Layanan Informasi PPIID Badan Publik</p> <p>2)Diskusi Publik Hari Ketubukan Informasi Nasional (KIN) dan Hari Hak Unak Tahun (RTKD)</p> <p>3)Forum Diskusi, Advocasi dan Literasi Badan Publik dalam penerangan Proses Ketubukan Informasi Publik dan Pemahaman UU KIP</p> <p>4)Penyusunan Kajian untuk Program sertifikasi Peningkatan kompetensi dan kapabilitas PPIID dan Edukasi ke Badan Publik terkait Sertifikasi</p> <p>N. Layanan Umum Komisi Informasi Pusat</p> <p>a)Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Peringkapan KI Pusat</p> <p>1)Forum Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Komisi Informasi Pusat</p> <p>2)Penyusunan dan Evaluasi E-SKP</p> <p>3)Penyusunan Analisis Peia Jabatan dan Ketubukan Pegawai Komisi Informasi Pusat Tahun 2022</p> <p>4)Pengembangan dan Pengelolaan Website Layanan Informasi</p> <p>5)Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Persuratan Digital dan Tera Naskah Diras Komisi Informasi Pusat</p> <p>6)Monitoring Trwujudan KIPA Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023</p> <p>7)Pengelolaan BMM Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KI Pusat Tahun 2023</p> <p>V. Layanan Perkaroran</p> <p>a)Gaji dan Tunjangan</p> <p>b)Operasional dan Pemeliharaan Kantor</p> <p>VI. Layanan Sarana Internal KI Pusat</p> <p>a)Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkaroran</p> <p>VII. Layanan Perencanaan dan Penganggaran KI Pusat</p> <p>a)Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran KI Pusat</p> <p>1)Rapat Penyusunan Kalender Kegiatan TA 2022</p> <p>2)Penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2022</p> <p>3)Manajemen Risiko KI Pusat Tahun 2022</p> <p>4)Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023</p> <p>5)Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKAKL) Tahun 2023</p> <p>VIII. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi VI Pusat</p> <p>a) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi VI Pusat</p> <p>1)Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2021</p> <p>2)Evaluasi Program dan Kinerja (Capaian B1-B12) TA 2022</p> <p>3)Monitoring dan Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2022; Semester I dan Trwujudan</p> <p>4)Penyusunan LAKIP Sekretariat KIP Tahun 2021</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/vent/06/03/2023/Rakornas-Informasi-Terhadap-ETD-Program-dan-Kegiatan-KI-Pusat-TA-2023</p>	<p>Ketua Tim Perencanaan</p>	<p>Tim Perencanaan</p>	<p>2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta</p>	<p>Softcopy dan hardcopy</p>	<p>3 tahun</p>	<p>Website</p>
--	--	--	------------------------------	------------------------	--	------------------------------	----------------	----------------

2,4	<p>Jadwal pelaksanaan Program dan Kegiatan</p> <p>1. Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan tertuju dalam Kalender Kegiatan Tahun 2023</p> <p>2. Jadwal Pelaksanaan Studi Servoce Informasi pada internet pada website Kominfo Informasi Pusat</p>	<p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p> <p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Kominfo Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
2,3	<p>Target dan/atau capaian program dan kegiatan</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Konsesor Bidang Penelitian dan Dokumentasi</p> <p>2. Program Penyelesaian Segera Informasi Publik Peningkatan dan Peleaksna Program : Konsesor Bidang Penyelesaian Segera Informasi</p> <p>3. Program Pengembangan Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintahan Publik Pemerintahan Peningkatan dan Peleaksna Program : Konsesor Bidang Pengembangan</p> <p>4. Layanan Umum Kominfo Informasi Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>5. Layanan Perantara Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>6. Layanan Sarana Internal KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>7. Layanan Perencanaan dan Pengembangan KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>Kontak : Wisma BSG Lantai 9 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat Telp. 021 - 34830741 Fax. 021 - 3451734 Email : sekretariat@kominfo.go.id</p> <p>Target Realisasi & Capaian Program Kegiatan Kominfo Informasi Pusat Tahun 2023 sebagai berikut</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : Nilai Indeks 73</p> <p>2. Program Penyelesaian Segera Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 98 Request Disediakan</p> <p>3. Program Pengembangan Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintahan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 90 Badan Publik Informatif</p> <p>4. Layanan Ggij, Operasional Pelayanan dan Layanan Umum Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 1 Layanan</p>	<p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p> <p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Kominfo Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
2,2	<p>Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan serta kerja terpadu dan/atau secara terpadu</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Konsesor Bidang Penelitian dan Dokumentasi</p> <p>2. Program Penyelesaian Segera Informasi Publik Peningkatan dan Peleaksna Program : Konsesor Bidang Penyelesaian Segera Informasi</p> <p>3. Program Pengembangan Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintahan Publik Pemerintahan Peningkatan dan Peleaksna Program : Konsesor Bidang Pengembangan</p> <p>4. Layanan Umum Kominfo Informasi Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>5. Layanan Perantara Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>6. Layanan Sarana Internal KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Umum</p> <p>7. Layanan Perencanaan dan Pengembangan KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>8. Layanan Pemantauan dan Evaluasi KI Pusat Peningkatan dan Peleaksna Program : Ketua Tim Kerja Perencanaan</p> <p>Kontak : Wisma BSG Lantai 9 Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat Telp. 021 - 34830741 Fax. 021 - 3451734 Email : sekretariat@kominfo.go.id</p> <p>Target Realisasi & Capaian Program Kegiatan Kominfo Informasi Pusat Tahun 2023 sebagai berikut</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : Nilai Indeks 73</p> <p>2. Program Penyelesaian Segera Informasi Publik Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 98 Request Disediakan</p> <p>3. Program Pengembangan Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintahan Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 90 Badan Publik Informatif</p> <p>4. Layanan Ggij, Operasional Pelayanan dan Layanan Umum Target Realisasi Anggaran : 100% Target Capaian Kinerja : 1 Layanan</p>	<p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p> <p>https://www.kominfo.go.id/infocenter/2023/realisasi-informasi-tengah-digitalisasi</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Kominfo Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website

2.5	<p>Anggaran Program dan Kegiatan meliputi Sumber dan Jumlah</p> <p>Anggaran Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2023 Komisi Informasi Pusat adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik Anggaran : Rp. 7.018.124.000</p> <p>2. Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Anggaran : Rp. 2.884.613.000</p> <p>3. Program Pelaksanaan Ketertuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah Anggaran : Rp. 5.418.587.000</p> <p>4. Belanja Gaji, Operasional Perkantoran dan Layanan Umum Anggaran : 24.726.280.000</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023/Program-Indeks-Keterbukaan-Informasi-Publik</p> <p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023/Program-Penyelesaian-Sengketa-Informasi-Publik</p> <p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023/Program-Pelaksanaan-Ketertuan-Keterbukaan-Informasi-Publik-di-Badan-Publik-Pemerintah</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
2.6	<p>Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Komisi Informasi Pusat</p> <p>Jadwal Pelaksanaan Program & Kegiatan Komisi Informasi Pusat temo pada dokumen Kalender Kegiatan Tahun 2023</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/06123106-Kalender-KI-Pusat-TA-2023.pdf</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
2.7	<p>Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat</p> <p>1. Syarat Pendaftaran Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : 1. Identitas Pemohon a) Permohon Individu (Lampirkan KTP) b) Permohon Badan Hukum (Lampirkan SK Kurnham dan Akta Pendirian) c) Permohon Kelompok Masyarakat (Lampirkan Surat Kuasa) 2. Berkas Permohonan Kepada Badan Publik a) Surat Permohonan Informasi ke Badan Publik b) Surat Jawaban dari Badan Publik (Apabila Ada) c) Surat Keberatan d) Surat Jawaban Keberatan (Apabila Ada) 2. Syarat Pendaftaran Permohonan Informasi Publik : a. Formulir Permohonan b. Identitas Pemohon c. Surat Kuasa (apabila Pemohon menaruh kuasa) d. AD ART yang sudah disahkan oleh KumiHAM (untuk Pemohon Badan Hukum)</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/23Kategori-Sengketa-Sengketa-Informasi-Publik</p>	PPID dan Ketua Tim Hukum	PPID dan Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website
3	<p>Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Komisi Informasi Pusat</p> <p>Kegiatan yang telah dilaksanakan termuat dalam Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 s.d Tahun 2022</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2017/02/2017LaporanTahunan</p>	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	3 tahun	Website
4	<p>Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit</p> <p>1. Laporan Realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2017 s.d 2021 2. Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran.</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023LaporanKeuangan-581743088888</p>	Ketua Tim Umum	Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	3 tahun	Website
4.2	<p>Neraca</p> <p>Neraca Komisi Informasi Pusat sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023Neraca-581743088888</p>	Ketua Tim Umum	Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	3 tahun	Website
4.3	<p>Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan</p> <p>Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALN) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021</p>	<p>https://komisiinformasi.go.id/ind/2023/02/2023LaporanArusKas-581743088888</p>	Ketua Tim Umum	Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	3 tahun	Website

4.4	Daftar aset dan inventaris	Daftar aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat termasuk Laporan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021	https://komisiinformasi.go.id/file/14/03/2023/36Keuangan-2017-2021.pdf	Keluara Tim Umum	Keuangan	2022 dan 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy	3 tahun	Website
5 Ringkasan laporan akses Informasi Publik									
<p>Jumlah Permittaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diterima : 1 permohonan Jumlah Permittaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 - Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diterima : 8 permohonan - Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diterima : 24 permohonan - Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diterima : 1 permohonan - Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diterima : 1 permohonan 									
<p>Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 adalah 5 hari kerja</p> <p>Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022 adalah 10 hari kerja</p>									
5.2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permittaan Informasi Publik	<p>Jumlah Permittaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada <p>Jumlah Permittaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 8 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada - Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 4 permohonan Jumlah yang ditolak : 20 permohonan - Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada - Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada 	https://komisiinformasi.go.id/file/14/03/2022/36Statistik-Akses-Informasi	PPIID	PPIID	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	1 tahun	Website
5.3	Jumlah Permittaan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak	<p>Jumlah Permittaan Informasi Publik yang diterima pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tri Wulan PPIID dan register permohonan informasi publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 8 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada - Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 4 permohonan Jumlah yang ditolak : 20 permohonan - Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada - Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang dikabulkan : 1 permohonan Jumlah yang ditolak : tidak ada 	https://komisiinformasi.go.id/file/14/03/2022/36Statistik-Akses-Informasi	PPIID	PPIID	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	1 tahun	Website
6 Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat									
6.1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan di Komisi Informasi Pusat	https://komisiinformasi.go.id/file/14/03/2023/36Rancangan-Peraturan-Komisi-Informasi-Pusat-Tahun-2023	TA Tim Hukum	Tim Hukum				

6.2	<p>Daftar Peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan</p>	<p>Daftar Peraturan perundang-undangan, putusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan Komisi Informasi Pusat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Informasi 2. Putusan Komisi Informasi Pusat 3. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat 4. Yurisprudensi <p>sebagaimana tercantum pada Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Informasi Pusat</p>	<p>https://kominformasi.go.id/feed/06-03-2023/daftar-produk-hukum-komis-informasi-pusat</p> <p>https://jih.komisinformasi.go.id/</p>	Ketua Tim Hukum	Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website JDIH	
7	<p>Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik</p>	<p>Tata cara memperoleh Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi kepada PPIID melalui surat, fax, e-mail, telepon atau datang langsung ke tempat layanan PPIID Komisi Informasi Pusat; 2. Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organelasi; 3. Pemohon Informasi menerima tanda bukti permohonan informasi dari Pelugas Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dilengkap; 4. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan; 5. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor register permintaan dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pembaruan tertulis yang berkenaan : <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak. - Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang mememua permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta. - Penyerahan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikucilkan (dirahasiakan). - Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan. - Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikucilkan maka informasi yang dikucilkan tersebut dapat dihentikan dengan disertai alasan dan materinya. - Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan. - Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. <p>Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pembaruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.</p>	<p>Tata cara terangnya: Keputusan Timotias Prodek of Komisi Informasi Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. penolakan berdasarkan alasan Pengucilaan Informasi Publik; b. tidak dibedakannya Informasi berkala; c. tidak dilanggarnya Permintaan Informasi Publik; d. permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi 45 Publik; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini. 2). Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPIID secara tertulis melalui media elektronik dan/atau non elektronik dengan datang langsung atau tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan mengisi Formulir Keberatan. 3). Formulir keberatan sekurang-kurangnya memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik; c. tujuan penggunaan Informasi Publik; d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; e. alasan pengajuan keberatan. 4). Atasan PPIID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan tersebut. 	<p>https://kominformasi.go.id/feed/17/01/2023/layanan-PPIID-Komis-Informasi-Pusat</p>	PPIID	PPIID	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website
7.2	<p>Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik bentuk pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi</p>		<p>https://kominformasi.go.id/feed/06-03-2022/20210015355-AIur%20Keberatan.jpg</p>	PPIID dan Ketua Tim Hukum	PPIID dan Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website	

		5). Jika Pemohon Informasi tidak puas terhadap tanggapan dari Atasan PPID, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan keberatan dapat mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Pusat.							
8	Informasi tentang tata cara pengabdian penggunaan atau pelayanan oleh Komisi Informasi Pusat	Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Komisi Informasi Pusat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan keluhan akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Komisi Informasi Pusat jika terjadi dugaan pelanggaran. Komisi Informasi Pusat dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tenur. Berikut Kontak Kami jika ada pengabdian penggunaan atau pelayanan oleh Komisi Informasi Pusat : Email : kodewik@komisiinformasi.go.id atau Faximile : 021 - 34830741 Surat : Diujukan Kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, Wisma BSSG LL 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Tanah Abang, Jakarta Pusat	https://www.lapod.go.id/informasi/komisi-informasi-publik	Ketua Tim Humas	Admin Lapor	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa								
9.1	Pengumuman pengadaan barang dan jasa	Pengumuman informasi pengadaan terfasilitasi dalam Aplikasi	https://komisiinformasi.go.id/read/14/03/2023/Keuangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Tim Pengadaan	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	1 Tahun	Website
10	Informasi tentang ketenagakerjaan								
10.1	Informasi ketenagakerjaan Komisi Informasi Pusat	Informasi ketenagakerjaan Komisi Informasi Pusat terdiri atas : 1. Komposisi SOM Komisi Informasi Pusat berdasarkan Jabatan 2. Komposisi SOM Komisi Informasi Pusat berdasarkan Jenis Kelamin 3. Komposisi SOM Komisi Informasi Pusat berdasarkan PNS dan PPNP	https://komisiinformasi.go.id/read/06/03/2023/Struktur-Organisasi-Sekretariat-Komisi-Informasi-Pusat	Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	CATATAN	Pegawai yang Menguasai Informasi	Unit/ PIC yang Menguasai	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Retensi Arsip	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 yang meliputi Informasi Berkala dan Informasi yang tersedia Setiap Saat	https://komsinformati.go.id/read/18032/2023/08/08/daftar-informasi-publik-komisi-informasi-pusat	PPID	PPID	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	Website
2	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Komisi Informasi Pusat		https://komsinformati.go.id/read/06003/2023/08/08/daftar-produk-hukum-komisi-informasi-pusat https://idh.komsinformati.go.id/ https://komsinformati.go.id/read/06003/2023/08/08/daftar-produk-hukum-komisi-informasi-pusat https://idh.komsinformati.go.id/	Ketua Tim Hukum	Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
2.1	Daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	Basis Daftar Peraturan, Keputusan, Edaran dan/ atau Kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat tertuang dalam JDH	https://idh.komsinformati.go.id/ https://komsinformati.go.id/read/06003/2023/08/08/daftar-produk-hukum-komisi-informasi-pusat	Ketua Tim Hukum	Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
2.2	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan	Dokumen Peraturan, Keputusan, Edaran dan/ atau Kebijakan yang telah diterbitkan di Komisi Informasi Pusat	https://idh.komsinformati.go.id/	Ketua Tim Hukum	Tim Hukum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan								
3.1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personal dan keuangan	<p>Pedoman pengelolaan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat; 2. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023; 3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2023; 4. Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 10/KEP/KIP/XII/2020 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Informasi Pusat 	https://idh.kominfo.go.id/produk_hukum/2022/09/28/Peraturan-Menteri-Kominfo-dan-Informatika-Nomor-6-Tahun-2022	Ketua Tim Umum	Tim Umum	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website Buku
3.2	Profil Pimpinan dan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022-2026 2. Profil Pegawai Komisi Informasi Pusat 	https://komsinformati.go.id/read/03008/2022/komisioner-kip-pusat-2022-%E2%80%93-2026 https://komsinformati.go.id/read/09002/2023/statistik-komisi-informasi-pusat	Ketua Tim Umum	Kepegawaian dan Tim website	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website
3.3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya	Anggaran Komisi Informasi Pusat secara umum tertuang dalam DIP A dan secara khusus termuat dalam RKAKL dan Laporan Keuangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	https://komsinformati.go.id/read/06003/2023/keuangan-pusat-dan-anggaran	Ketua Tim Umum	Keuangan	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website Buku
3.4	Data statistik yang dibuat dan dikecoba oleh Badan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data statistik permohonan informasi publik sebagaimana termuat dalam : a. Laporan Layanan PPID KI Pusat Tahun 2019 b. Laporan Layanan PPID KI Pusat Tahun 2020 c. Laporan Layanan PPID KI Pusat Tahun 2021 2. Data Statistik Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat 3. Data Kepegawaian Komisi Informasi Pusat 4. Data Statistik IKIP Tahun 2021 dan 2022 5. Data Money Badan Publik 	https://komsinformati.go.id/read/14003/2023/statistik-program-komisi-informasi-pusat-tahun-2023 https://komsinformati.go.id/read/14003/2023/statistik-kepegawaian-komisi-informasi-pusat https://komsinformati.go.id/read/14003/2023/statistik-akses-informasi	Ketua Tim Umum PPID	Kepegawaian Tim website PPID TA Kelembagaan TA Ladox	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website

4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	Surat-Surat perjanjian dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat berupa : 1. Nota Kesepakatan antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) RI Tahun 2021 2. Perjanjian Kerja Bersama antara Komisi Informasi Pusat dengan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian PDT RI Tahun 2021 3. Perjanjian Kerja Bersama antara Komisi Informasi Pusat dengan Dijen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian PDT RI Tahun 2021	https://komisiinformasi.go.id/v/2/kenesa%20ma	Ketua Tim Humas	Tim Humas	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website
5	Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya Komisi Informasi Pusat	Agenda surat menyurat Pimpinan Komisiner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang meliputi : 1. Agenda surat masuk 2. Agenda surat keluar 3. Nota dinas		Ketua Tim Umum	Persuratan TU Pimpinan	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	
6	Data perbendaharaan atau inventaris	Data aset dan inventaris Komisi Informasi Pusat termuat dalam Laporan Barang Milik Negara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021	https://komisiinformasi.go.id/read/06/03/2023/Kuawangan-dan-Anggaran	Ketua Tim Umum	Operator BIKN	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
7	Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat	Rencana strategis dan rencana kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026	https://komisiinformasi.go.id/read/06/03/2023/Rencana-Komis-Info-Pusat-2022-2026	Ketua Tim Perencanaan	Tim Perencanaan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	3 tahun	Website
8	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Agenda kerja Pimpinan Komisiner dan Sekretaris Komisi Informasi Pusat yang terdiri dari : 1. Agenda kegiatan Komisiner 2. Agenda kegiatan Sekretaris		Ketua Tim Umum	Tim Umum TU Pimpinan	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 tahun	
9	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang meliputi kegiatan menjawab Pemohonan Informasi, penyusunan Laporan Layanan PPID, dan dokumentasi Pelayanan PPID termuat dalam : 1. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 2. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2020 3. Laporan Layanan PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2021	https://komisiinformasi.go.id/read/17/01/2023/Layanan-PPID-Komis-Info-Pusat	PPID	PPID	2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Website
10	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya	Rekapitulasi pelanggaran disiplin pegawai Komisi Informasi Pusat Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang terdiri dari 1. Hukuman Berat 2. Hukuman Ringan		Ketua Tim Umum	Kepegawaian	2019, 2020, 2021, 2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	

11	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan Komisi Informasi Pusat									
11.1	Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan dalam lingkup Komisi Informasi Pusat antara lain : 1 Laporan dan Buku IKIP Tahun 2020, 2021 dan 2022 2 Jurnal Keterbukaan Informasi Publik		Komisiner Kebudayaan Komisioner Lidok	TA Kebudayaan TA Lidok	2020, 2021, 2022, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Buku IKIP Jurnal BUKA		
13	Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya									
13.1		Kertas Kerja Peraturan Komisi Informasi	Komisiner Regik	TA Regik						
14	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum									
14.1	Informasi dan kebijakan yang disampaikan melalui pemberitaan dan sosialisasi	https://komisiinformasi.go.id/	Kelua Tim Humas	Tim Humas/ Medsos	2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Digital/ webpages	Selama berlaku	Website Jurnal Media Sosial		
15	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala									
15.1	Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 yang meliputi Informasi Berkala dan Informasi yang tersedia Setiap Saat	hard copy	PPID	PPID	2020, 2023, Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jakarta	Softcopy dan hardcopy	Selama berlaku	Website		

Pt Sekretaris Komisi Informasi Pusat


Nunik Purwanti